

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya diberbagai daerah ataupun tempat yang dapat digunakan sebagai acuan dan referensi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Jenis	Hasil
1.	Esmeralda (2021)	Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 Pada Masjid Agung Khairullah.	Kualitatif	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Masjid Agung Khairullah masih belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan <i>Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan</i> (ISAK) 35. Pencatatan laporan keuangan dilakukan dengan merekap kas masuk dan kas keluar kemudian dipublikasikan kepada jamaah masjid. Dari hasil penelitian ini melaporkan bahwa yayasan tersebut belum mempunyai pedoman struktur organisasi yang memisahkan pembagian wewenang, dan tanggung jawab. Laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan PSAK 45 mengklarifikasikan asset bersih. Dan pengakuan kerugian piutang secara langsung.
2.	Diyani Ade Rizky (2016)	Analisis Penerapan PSAK 45 Pada Masjid Al Falah.	Kualitatif	

- | | | | | |
|----|--|--|------------|---|
| 3. | Anni Safitri,
Ainul Liya,
Siska Dewi
(2021) | Penyusunan
Laporan Keuangan
Berdasarkan ISAK
35 Pada TPQ
Pekalongan. | Kualitatif | <p>Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar pencatatan data diperoleh dari data sekunder berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan pada data primer diperoleh melalui hasil wawancara. Siklus akuntansi pada TPQ di Pekalongan ini belum lengkap dan belum sesuai dengan standar yang telah berlaku. Laporan keuangan TPQ ini seharusnya sudah dibuat sesuai dengan pedoman ISAK 35 yaitu laporan keuangan, laporan penghasilan, laporan kas, dan catatan terhadap laporan keuangan.</p> <p>Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar pencatatan yang telah diterapkan pada Masjid Baitul Jember menggunakan metode basis kas. Dari siklus akuntansinya masih belum lengkap dan belum sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan keuangan yang seharusnya dibuat yaitu laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pada Masjid Baitul Jember ini belum diterapkan sesuai dengan pedoman ISAK 35.</p> |
| 4. | Ismi
Darajatul Ula
(2021) | Penerapan ISAK
35 Pada Masjid
Baitul Jember. | Kualitatif | |

- | | | | | |
|----|--------------------------------|---|------------|---|
| 5. | Pipit Rosita
(2016) | Laporan Keuangan
Masjid. | Kualitatif | <p>Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa organisasi masjid dalam pengelolaan keuangan membutuhkan penerapan akuntansi yang baik agar bisa mempertanggung jawabkan kepada para donator dan masyarakat. Laporan keuangan ini berstruktur dalam PSAK 45 tahun 2011 yang dijadikan pedoman untuk penyusunan laporan keuangan dan menghasilkan akuntabel lebih transparan. Hal ini juga mampu menjawab atas ketidakpercayaan dari masyarakat yang bertanya perihal laporan keuangan masjid.</p> <p>Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan masjid al hidayah belum membuat laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 yang menyajikan laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.</p> |
| 6. | Yunus
Dwikasmanto
(2021) | Penyusunan
Laporan Keuangan
Masjid Al Hidayah
berdasarkan ISAK
35. | Kualitatif | <p>Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada masjid Hasanuddin yang dibuat oleh pengurus masjid belum sesuai dengan PSAK 45. Aset masjid juga belum dikelompokkan dalam asset neto yang terdapat pada pedoman PSAK 45.</p> |
| 7. | Windha
Mutia (2017) | Penyusunan
Laporan Keuangan
Masjid Hasanuddin
Banjarmasin
berdasarkan PSAK
45. | Kualitatif | <p>Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada masjid Hasanuddin yang dibuat oleh pengurus masjid belum sesuai dengan PSAK 45. Aset masjid juga belum dikelompokkan dalam asset neto yang terdapat pada pedoman PSAK 45.</p> |

Sumber : Dibuat oleh penulis

Penelitian ini dilakukan secara umum memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam beberapa hal merupakan subjek penelitian yang digunakan adalah masjid. Kemudian pada metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Pada standar laporan keuangannya menggunakan *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan* (ISAK) 35 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Seperti yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya juga sedang mendiskusikan mengenai penyusunan laporan keuangan masjid berpodaman pada ISAK 35.

Pada hal ini berbeda dengan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam hal lokasi penelitian dan periode analisis. Penulis melakukan penelitian pada Masjid Nurul Iman Kaliwungu Jombang dan periode analisis sejak bulan Januari 2022 hingga bulan Agustus 2022.

2.2 Tinjauan Teori

1. Organisasi Nirlaba

Menurut Sulistiawan (2007), menjelaskan bahwa organisasi nirlaba merupakan organisasi yang didikan oleh masyarakat dalam bentuk yayasan, organisasi profesi, partai politik, ataupun organisasi keagamaan. Organisasi ini dimiliki dan dikelola oleh masyarakat.

Andriani (2019), menjelaskan bahwa di Indonesia organisasi nirlaba yang diakui oleh pemerintah diatur dalam tiga buah regulasi dan dapat dikelompokkan sebagai yayasan, organisasi masyarakat (ormas) maupun lembaga pengelola zakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa masjid diklasifikasikan sebagai yayasan, oleh karenanya mengacu pada UU R.I No. 16 tahun 2001 mengenai yayasan yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 2008. Dalam UU tersebut jelas disebutkan bahwa sebuah yayasan harus berbadan hukum dan mungkin didirikan dengan substansi kegiatan pada bidang sosial, keagamaan atau kemanusiaan dan bertujuan bukan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Shoimah (2021), menyatakan bahwa Istilah nirlaba merupakan istilah yang digunakan untuk entitas yang mempunyai tujuan sosial, kemasyarakatan atau yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk mendukung kepentingan publik yang bersifat tidak komersial, organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, sekolah, rumah sakit dan klinik publik, organisasi masyarakat, organisasi sukarelawan dan serikat buruh (Marlina dan Ibrahim, 2018).

Menurut *Ikatan Akuntansi Indonesia* (2018), Terdapat perbedaan karakteristik organisasi nirlaba dan organisasi bisnis berorientasi laba yaitu cara organisasi nonlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya, organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

2. Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba Dan Akuntabilitasnya

Menurut Ghassani (2020), menyatakan bahwa masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nirlaba dan lebih spesifik diklasifikasikan sebagai yayasan. Dalam menjalankan aktivitasnya masjid mengelola sumber daya yang dimilikinya dan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas. Melalui kegiatan masjid yang bersifat jasa, masjid dikelompokkan sebagai organisasi *non-profit*. Adapun maksud dari kegiatan masjid yang bersifat jasa adalah masjid memberikan fasilitas yang bersih, tenang dan suci untuk para jamaah yang beribadah. Selain itu masjid juga memberikan pendidikan agama kepada jamaah seperti kegiatan khotbah dan pengajian. Jasa lain yang diberikan masjid kepada masyarakat adalah pengurus masjid sebagai bagian dari amil zakat, panitia kurban, dan lain-lain. Menurut *Dewan Masjid Indonesia* (DMI) yang telah dikutip oleh Ghassani (2020) memiliki 3 fungsi dalam masjid sebagai berikut :

- a. Masjid sebagai sarana atau tempat ibadah.
- b. Masjid sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid.
- c. Masjid sebagai pusat komunikasi.

Dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya masjid memiliki pengurus masjid yang bisa juga disebut sebagai takmir masjid. Pengurus masjid ini memiliki beberapa tugas, salah satunya menyediakan tempat atau sarana untuk masyarakat melakukan ibadah. Selain itu pengurus masjid juga bertugas untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan masjid dengan baik. Seperti halnya organisasi bisnis, organisasi nirlaba tidak terlepas dari aspek keuangan. Masjid sendiri merupakan organisasi nirlaba yang dibiayai oleh masyarakat melewati donasi atau sumbangan, oleh karena itu pertanggungjawaban keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi organisasi nirlaba. Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana organisasi mengelola dan menggunakan dana yang diperoleh dari masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap masjid. Adapun pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan (Nariasih 2017).

Menurut Siskawati, dkk (2016), menjelaskan bahwa akuntabilitas organisasi masjid bersifat kontekstual yang meliputi kesepakatan aturan sosial suatu komunitas yang menjadi suatu budaya dan tradisi yang tercermin melalui perilaku aktor. Dalam konteks akuntansi organisasi masjid, akuntabilitas memiliki beberapa tantangan, misalnya tidak adanya hukum dan aturan yang mewajibkan organisasi tersebut untuk membuat laporan kinerja.

Menurut Andriani (2019), menyatakan bahwa Bentuk akuntabilitas kepengurusan masjid dapat ditunjukkan melalui kemampuan masjid dalam memakmurkan masjid dan masyarakat di sekitarnya. Bentuk lainnya juga dapat dilihat dari kemampuan pengurus masjid menghasilkan laporan keuangan dan mensosialisasikannya secara periodik kepada masyarakat. Akan tetapi tidak ada tuntutan dari masyarakat untuk menunjukkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia.

3. Siklus Akuntansi dan Laporan Keuangan

a. Siklus Akuntansi

Menurut Bahri (2020), menjelaskan bahwa siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan mulai dari identifikasi transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan siap untuk pencatatan berikutnya. Siklus akuntansi ini memiliki 3 tahapan yaitu :

- 1) Tahap pencatatan yaitu tahap mencatat semua bukti transaksi kedalam buku jurnal.
- 2) Tahap pengikhtisaran adalah tahap dimana semua akun di *posting* ke dalam buku besar dan dikumpulkan pada neraca saldo dengan menampilkan saldo terkini yang telah disesuaikan.
- 3) Tahap pelaporan merupakan tahap pembuatan laporan keuangan.
- 4) Tahap Penyusunan ialah tahap menyusun seluruh laporan keuangan.

Sedangkan menurut Halim siklus akuntansi dibagi menjadi tiga tahap, yakni:

a. Tahap Pencatatan

Merupakan kegiatan identifikasi serta pengukuran bukti transaksi dan buku catatan, mencatat bukti transaksi kedalam buku jurnal, serta memasukkan bukuan kedalam buku besar.

b. Tahap Pengikhtisaran

Merupakan kegiatan menyusun neraca saldo berdasarkan buku besar, penyusunan kertas kerja, pembuatan jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan.

c. Tahap Pelaporan

Tahap akhir yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba komprehensif, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menginformasikan secara transparan tentang posisi dan kinerja keuangan yang diperlukan para pemakai laporan keuangan sebagai upaya mengambil keputusan. Berikut adalah beberapa tujuan penyusunan laporan keuangan :

1. Menginformasikan tentang jenis dan total aset
2. Menginformasikan tentang kewajiban dan ekuitas
3. Menginformasikan tentang jenis dan jumlah pemasukan
4. Menginformasikan jenis dan besaran beban
5. Menginformasikan tentang perubahan aset, liabilitas dan ekuitas

6. Menginformasikan tentang kinerja manajemen entitas selama periode waktu tertentu, dan

7. Menginformasikan tentang catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan dipergunakan oleh suatu entitas, baik entitas laba ataupun entitas nonlaba. Entitas nonlaba adalah entitas yang didirikan atas dasar untuk melayani kepentingan publik, dimana sumber dana yang diterima berasal dari penyumbang yang tidak menginginkan dana kembali terhadap dana yang telah di donasikan. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba diatur dalam ISAK 35.

4. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan itu untuk memberikan informasi tentang keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang dimanfaatkan beberapa dari kalangan pengguna laporan untuk serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan dana-dana yang dipercayakan kepada mereka. Laporan tersebut disajikan secara bulanan dan harus memberikan data yang valid untuk disajikan seperti pada laporan keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas. Laporan keuangan pada organisasi nonlaba ini merupakan hasil laporan dari keuangan, laporan aset-aset neto, penghasil komprehensif, arus kas, dan catatan tiap-tiap hasil laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses perhitungan akuntansi. Kegiatan pencatatan dan penggolongan juga merupakan suatu proses yang telah dilakukan secara rutin dan berulang-ulang pada saat terjadi transaksi keuangan. Sedangkan pada kegiatan pelaporan dan penganalisisan hanya dilakukan pada waktu tertentu. Kegiatan ini bersifat rutin dan dapat dilakukan secara manual seperti pada pencatatan yang sering kali

dijumpai di masjid-masjid kecil. Ada pun yang dikerjakan dengan mesin otomatis seperti pencatatan di masjid besar.

Alqodri (2017) Perkembangan teknologi ini menunjukkan bahwa penggunaan mesin-mesin pembukuan dan computer dapat mengelola data akuntansi yang semakin banyak digunakan baik dalam masjid besar ataupun menengah. Dalam metode ini pencatatan akuntansi akan digunakan dalam suatu organisasi. Baik secara tulis tangan, elektronik, dan lain-lain sesuai pada berbagi faktor. Hal penting yang dapat dipertimbangkan yaitu besarnya organisasi, jumlah data yang harus diproses, dan juga jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam pemakaian disetiap metode tersebut. Tanpa memandang metode pencatatan akuntansi yang digunakan, semua metode sama-sama membutuhkan adanya konsep dasar dari akuntansi itu sendiri.

Proses pencatatan akuntansi pada masjid ini sangat sederhana daripada dengan pencatatan akuntansi komersial. Dalam pencatatan akuntansi ini memiliki langkah yang utama untuk mengelompokkan sumber pendapatannya. Contohnya pendapatan dari ibu pengajian, kegiatan rutin, peserta TPA, dan juga donator-donatur lainnya. Dengan ini pencatatan dari akuntansi yang jelas antara pemasukkan dengan pengeluaran, maka donator beserta warga sekitar tidak perlu lagi untuk menanyakan berapa jumlah saldo dari masjid tersebut, dan juga berapa jumlah sumbangan dari donator. Dipenarapan ini, akuntansi masjid lebih menggunakan metode pencatatan berbasis cash yaitu pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayar (Andarsari 2016).

5. Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

Diviana, (2020) menjelaskan bahwa pada tahun 1997 laporan keuangan entitas nirlaba diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. Namun sejak 11 April 2019 dilakukan pencabutan atas PSAK 45 yang tertuang pada PPSAK 13 dan diterbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang merupakan interpretasi dari PSAK 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Penyajian laporan keuangan entitas nirlaba disusun dengan memperhatikan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Penyajian Laporan keuangan mengizinkan entitas nirlaba menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan itu sendiri (*Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018*).

Menurut ISAK 35 tujuan penggunaan laporan keuangan entitas nirlaba pada umumnya memiliki kepentingan untuk menilai:

- a. Cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
- b. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik.

Sedangkan menurut Dwikasmanto (2020), menyatakan bahwa berdasarkan ISAK 35, laporan keuangan entitas nirlaba setidaknya menyusun 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut:

a. Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan keuangan komprehensif merupakan laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu entitas dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan komprehensif ini digunakan untuk mengetahui kinerja suatu entitas dalam pengelolaan keuangan. Dalam ISAK 35 terdapat dua buah format laporan penghasilan komprehensif, yaitu:

- 1) Format A menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal. Format A ini memudahkan penyusunan laporan secara kompratif.
- 2) Format B sebagai penyaji informasi yang sesuai dengan klasifikasi aset neto.

Gambar 2.1 Format Laporan Komprehensif (Format A)

LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF PADA AKHIR TAHUN 20X0 / 20X1		
TANPA PEMBATAAN DARI SUMBER DAYA	20X0	20X1
Pendapatan		
Sumbangan	Rp. -	Rp. -
Jasa Layanan	Rp. -	Rp. -
Penghasilan Investasi Jangka Pendek	Rp. -	Rp. -
Penghasilan Investasi Jangka Panjang	Rp. -	Rp. -
Lain-lain	Rp. -	Rp. -
Total Pendapatan	Rp. -	Rp. -
Beban	Rp. -	Rp. -
Gaji, Upah	Rp. -	Rp. -
Jasa dan Profesional	Rp. -	Rp. -
Depresiasi	Rp. -	Rp. -
Bunga	Rp. -	Rp. -
Lain-lain	Rp. -	Rp. -
Total Beban	Rp. -	Rp. -
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Pendapatan		
Sumbangan	Rp. -	Rp. -
Penghasilan Investasi Jangka Panjang	Rp. -	Rp. -
Total Pendapatan	Rp. -	Rp. -
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	Rp. -	Rp. -
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF		Rp. -

(Sumber : Interpretasi Standar Akuntansi keuangan (ISAK) 35)

Gambar 2.2 Format B Laporan Komprehensif
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
PADA AKHIR TAHUN 20X0 / 20X1

	20X0		Jumlah	20X1		Jumlah
	TANPA PEMBATASAN DARI SUMBER DAYA	DENGAN PEMBATAS AN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		TANPA PEMBATAS AN DARI SUMBER DAYA	DENGAN PEMBATAS AN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
Pendapatan						
Sumbangan	Rp.-	Rp.	Rp.- Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
Jasa Layanan	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
Penghasilan Investasi Jangka Pendek	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
Penghasilan Investasi Jangka Panjang	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
Lain-lain	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
Total Pendapatan	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
Beban	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
Gaji, Upah	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
Jasa dan Profesional	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
Depresiasi	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
Bunga	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
Lain-lain	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
Total Beban	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
Pendapatan	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
Sumbangan	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
Penghasilan Investasi Jangka Panjang	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
Total Pendapatan	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	Rp.	Rp.	Rp.-	Rp.	Rp.-	Rp.
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	Rp.	Rp.-	Rp.-	Rp.-	Rp.-	Rp.-

(Sumber : Interpretasi Standar Akuntansi keuangan (ISAK) 35)

b. Laporan Arus Kas

Menurut Tinungki dan Pusung (2013), menjelaskan bahwa Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus uang masuk dan keluar dalam suatu periode. Laporan arus kas bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Penyajian laporan arus kas dibagi menjadi 3 kategori, sebagai berikut :

- 1) Aktivitas operasi merupakan penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi terkait dengan operasional entitas. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
 - a. Arus kas masuk aktivitas operasi dapat berupa penerimaan kas dari donatur, pendapatan bunga dan dividen atas pinjaman dan investasi, dan penjualann surat berharga.
 - b. Arus kas keluar aktivitas operasi dapat berupa pembayaran untuk gaji, barang dan jasa, serta pengeluaran untuk beban operasi.
- 2) Aktivitas investasi merupakan semua penerimaan dan pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi entitas. Investasi dapat berupa aktiva tetap, penempatan atau pencairan dana deposito, dan lain-lain. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi :
 - a. Pengeluaran kas untuk pembelian aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasikan dan aset tetap yang dibangun sendiri.
 - b. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepihak lain.

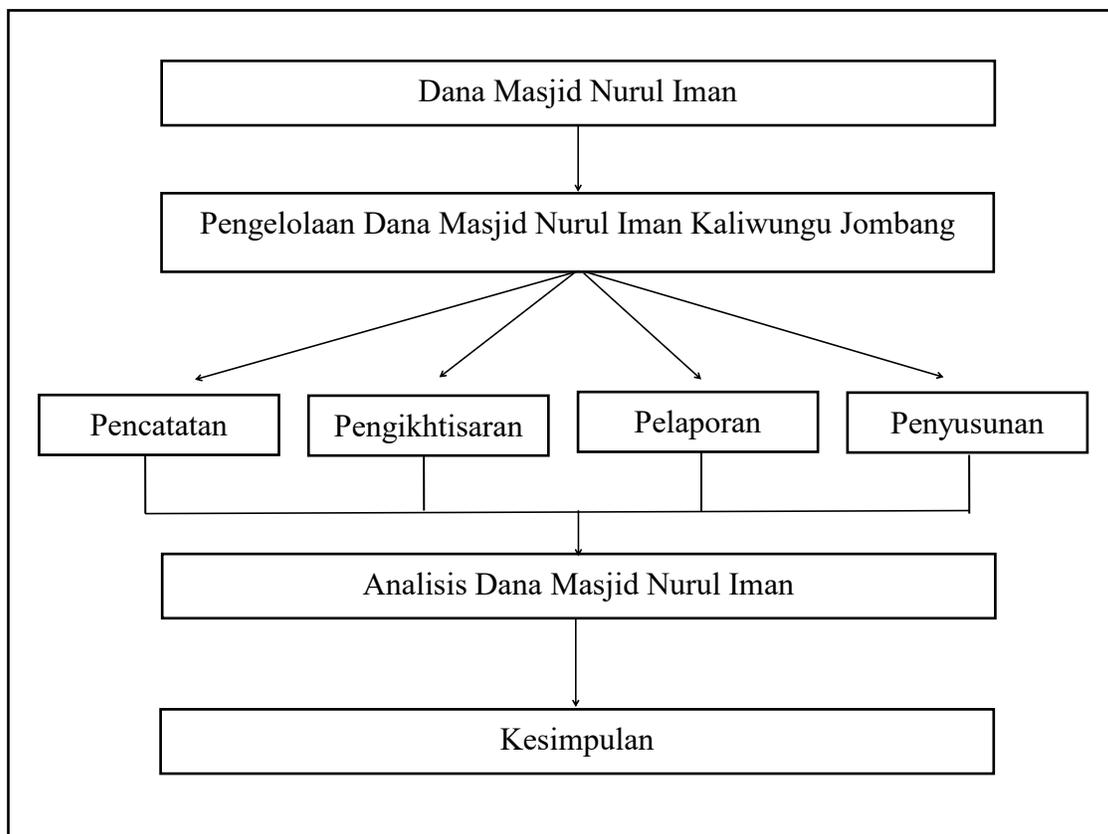
- c. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aset tidak berwujud dan asset jangka panjang lain.
 - d. Penerimaan kas dari penjualan surat berharga dan penagihan pinjaman.
- 3) Aktivitas pendanaan merupakan perkiraan terkait transaksi berupa pelunasan kewajiban hutang entitas dan kenaikan atau penurunan aktiva bersih dari surplus-defisit lembaga. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan sebagai berikut :
- a. Arus kas masuk aktivitas pendanaan berupa penerbitan wesel, obligasi, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, serta penerbitan saham biasa juga saham *preferen*.
 - b. Arus kas keluar aktivitas pendanaan berupa pelunasan pinjaman, pembayaran dividen, dan pembelian saham *treasury*.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, bahwa Masjid Nurul Iman Kaliwungu Jombang terhadap penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan pedoman *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35*. Dimana hal ini yang nantinya akan memunculkan sebuah pengaruh yang mungkin akan terjadi pada dana masjid Nurul Iman Kaliwungu Jombang. Penyusunan dana masjid ini juga terdapat peraturan yang diterapkan agar mampu mendorong pengurus masjid dalam melakukan pengelolaan dana masjid baik dari pencatatan sampai dengan pelaporan secara baik dan tepat waktu.

Pengurus masjid diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas yang baik dalam hal pembangunan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang telah ada di masjid ini. Dalam penelitian ini Masjid Nurul Iman kaliwungu menerapkan sistem akuntansi berdasarkan *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35* mengenai peraturan penyusunan laporan keuangan pada masjid.

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual



(Sumber : Penulis 2022)